



Journal of International Relations, Volume 9, Nomor 1, 2023, hal 427-450

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

UPAYA DAN PROSES OHCHR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UIGHUR DI XINJIANG, TIONGKOK

ABDUL ROZZAQ

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id.

ABSTRACT

The Chinese government is suspected of committing human rights violations by eliminating race or ethnicity in the Xinjiang region permanently either directly or slowly. The international world and the United Nations are concerned about the Uighur tribe in Xinjiang, for the occurrence of human rights violations in the form of genocide. The author uses conflict theory, conflict resolution, human rights, human rights violations, and peace. While the research method, the authors use a descriptive research type based on secondary data sources in the form of related literature. Previously, researchers conducted research on previous research in collecting materials that would be used in this study. Researchers examined the conflict from late 2017 to October 1, 2022. Researchers found that the results of efforts to resolve the conflict failed because OHCHR could not work optimally because China often obstructed investigations on the grounds that it was their internal conflict.

Keywords: United Nations, Uyghur, Tiongkok, HAM

PENDAHULUAN

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Timur yang dideklarasikan pada tahun 1949 oleh Mao Ze Dong yang kemudian menjadikan Tiongkok berhaluan komunis (Darini, 2010). Tiongkok memiliki wilayah yang sangat luas akibat dari Revolusi Kebudayaan yang pernah terjadi pada tahun 1966

sampai 1976 (Darini, 2010). Sebagian dari wilayah Tiongkok ada yang berbatasan dengan negara Eropa, akibat kondisi geografis membuat penduduk di Tiongkok lebih bervariasi. Di bagian utara, Tiongkok berbatasan dengan Mongolia, bagian selatan berbatasan dengan India, Bhutan, dan Nepal, di bagian Tenggara berbatasan dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan di bagian barat daya, Tiongkok berbatasan dengan Pakistan dan bagian barat berbatasan Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan (cnnindonesia.com, 2022).

Dengan diawasi oleh Departemen Pekerjaan di bawah Front Persatuan Partai Komunis, secara resmi Tiongkok melisensikan enam agama resmi, yakni Buddha Tiongkok, Agama Tradisional, Taoisme, Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan (Fathanah, 2020). Berdasarkan laporan Pew Research Center 2012, lebih dari 294 juta orang atau 21% dari populasi Tiongkok menganut agama Tradisional rakyat (Rahmi, 2022). Selanjutnya, menurut data Council of

Foreign Relations pada tahun 2020, jumlah penganut Buddha di Tiongkok sebesar 16,6% dari seluruh populasi. Di tempat ketiga ada agama Kristen yang dianut oleh warga Tiongkok sebanyak 7,4% dari populasi pada 2020. Meskipun sangat kecil, Islam juga berkembang di Tiongkok, yang dianut oleh 1,8% dari populasi masyarakat Tiongkok (Rahmi, 2022).

Pada tahun 1933 dan 1944, salah satu wilayah minoritas Islam saat ini di Tiongkok, Xinjiang, pernah berhasil memerdekakan kembali Republik Turkistan Timur. Berdirinya negara tersebut berasal dari semangat kebangkitan pembaharuan sosial dan politik di kalangan masyarakat suku Uighur setelah runtuhnya kekaisaran Tiongkok pada tahun 1910 (BBCIndonesia.com, 2009). Namun, kejayaan Xinjiang tidak bertahan lama, karena di tahun 1949 Xinjiang berhasil diambilalih oleh pemerintah Tiongkok dan mengganti nama Republik Turkistan Timur menjadi Xinjiang, yang artinya “Batas Baru” (CNNIndonesia.com, 2018). Xinjiang secara resmi ditunjuk sebagai wilayah otonom Tiongkok, seperti Tibet di sebelah selatan (BBC News, 2014).

Provinsi Xinjiang didiami mayoritas oleh suku Uighur yang beragama Islam yang juga berbatasan dengan negara-negara mayoritas islam. Namun, semua berubah ketika suku Han mulai migrasi besar-besaran ke Xinjiang, dan mengakibatkan suku Uighur tersisih dari

daerah Xinjiang. Suku Uighur kalah bersaing dengan suku Han yang lebih fasih berbahasa mandarin dan lebih kompeten. Akibatnya banyak masyarakat dari suku Uighur kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan (Authenticated U.S.Government Information, 2007).

Hal tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat suku Uighur. Menjelang Olimpiade Beijing tahun 2008, kelompok ekstremis dari suku Uighur melakukan serangan kepada polisi dan pemerintah Tiongkok yang menyebabkan pecahnya kerusuhan (BBCIndonesia.com, 2009). Agar wilayahnya tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja diduga beroperasi pada tahun 2015-2022 (BBCIndonesia.com, 2009). Tiongkok berusaha agar wilayah Xinjiang tidak keluar dari negara Tiongkok serta aman dan damai dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keributan dan perpecahan di Xinjiang (Karisma. 2017).

Namun, pembentukan kamp tersebut menimbulkan respon internasional yang mendesak untuk menghentikan aktivitas kamp Pendidikan ulang tersebut. 22 delegasi negara di OHCHR dari Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang dan Kanada menandatangani surat yang memprotes kamp Pendidikan ulang di Xinjiang (Saputra, 2019). Pada akhir 2017, Kantor PBB Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menerima peningkatan laporan dari berbagai kelompok masyarakat sipil bahwa anggota Uighur dan komunitas etnis minoritas Muslim lainnya “hilang” atau “dihilangkan” di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (OHCHR, 2022).

Di tahun 2018, Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela (The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) melaporkan peningkatan secara dramatis dalam kasus-kasus dari Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR) dengan didirikannya kamp-kamp pendidikan ulang di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang oleh Pemerintah Tiongkok (OHCHR, 2022). Sejumlah laporan penelitian dan investigasi yang diterbitkan sejak saat itu dari berbagai organisasi non-pemerintah, lembaga pemikir dan media serta laporan publik oleh para korban telah menuduh penahanan sewenang-wenang dalam skala luas di kamp-kamp tersebut. Selain itu, klaim penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, termasuk kekerasan seksual, dan kerja paksa juga muncul di kamp-kamp tersebut (Fiskesjo, 2022).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, disingkat (ICERD) memperkirakan bahwa 1.800.000 orang dari suku Uighur ditahan di

wilayah Xinjiang (bbc.com, 2018). Namun, pemerintah Tiongkok membantah laporan bahwa telah terjadi penahanan 1.800.000 muslim dari suku Uighur di Xinjiang, meskipun membenarkan bahwa pemerintah memang telah mengirim beberapa orang ke pusat-pusat Pendidikan (Riris, 2018).

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Kantor komisaris Tingkat tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merilis laporan tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, termasuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, aborsi paksa, dan pelanggaran kebebasan beragama (Roseanne, 2022). Laporan tersebut disambut oleh 60 kelompok organisasi Uighur di 20 negara, yang mengatakan bahwa laporan yang di keluarkan oleh OHCHR harus digunakan sebagai dasar sebagai tindakan nyata dengan tujuan mengakhiri kekejaman di wilayah Xinjiang (Roseanne, 2022).

Tiongkok sebenarnya mempunyai peran penting di PBB selama lebih dari 30 tahun (1990-2020). Sebagai contoh, Tiongkok merupakan penyumbang pasukan perdamaian terbesar bagi PBB atau terbanyak dari semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Hasugian, 2020). Tiongkok mengirim lebih dari 40 ribu pasukannya untuk 25 misi perdamaian PBB dalam 30 tahun terakhir. Tiongkok juga terlibat dalam misi perdamaian di lebih dari 20 negara dan kawasan termasuk Kamboja, Kongo, Liberia, Sudan, Lebanon, Siprus, Sudan Selatan, Mali, dan Republik Afrika Tengah (Hasugian, 2020). Pasukan bersenjata Tiongkok juga bekerja sama dengan pasukan perdamaian di lebih 90 negara dan 10 organisasi internasional dan regional (Hasugian, 2020).

Selama 30 tahun terlibat dalam misi perdamaian PBB tersebut, Tiongkok bahkan kehilangan 16 pasukan militernya (Hasugian, 2020). Selain pasukan keamanan, Tiongkok juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki kontribusi nomor dua terbesar untuk mendanai misi Pasukan Perdamaian PBB (Hasugian, 2020). Selain misi perdamaian, Tiongkok juga sangat royal dalam membantu negara-negara dunia ketiga dalam penanganan pandemik Covid-19 (Tommy, 2021). Pada Mei 2021 lalu Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa Tiongkok menawarkan bantuan sebesar US\$ 3 Miliar atau setara Rp 43 Triliun kepada seluruh negara di dunia dalam tiga tahun ke depan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemik Covid-19 (Tommy, 2021).

Berdasarkan keterangan di atas, Tiongkok terlibat aktif dalam operasi perdamaian di seluruh dunia di bawah bendera PBB. Selain itu, Tiongkok juga aktif membantu negara-negara lain untuk pulih dari pandemik Covid-19. Namun, di dalam negeri, Tiongkok justru

melakukan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Xinjiang. Oleh karena itu, berlatar belakang isu tersebut, menjadi dasar penelitian saya untuk meneliti upaya dan proses OHCHR dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan riset jurnal-jurnal atau peneliti-peneliti terdahulu, penelitian ini menggunakan kerangka teori konflik, nilai dan persaingan untuk status, kekuasaan, kekayaan ketika pasokan tidak cukup untuk semua orang, dimana pihak-pihak yang berkonflik, tidak hanya menginginkan penguasaan atas objek yang diinginkan, tetapi juga mengganggu, melukai, atau melukai lawan yang dihadapinya (Veeger, 1990).

Resolusi konflik, Resolusi konflik merupakan upaya dalam mengatasi penyebab konflik serta upaya membangun hubungan baru yang berpotensi langgeng dengan kelompok berkonflik. HAM, Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, asal kebangsaan, bahasa, agama atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan dan pendidikan, dan lain-lain. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut, tanpa diskriminasi.

Pelanggaran HAM, Merupakan kasus kejahatan dengan jumlah tidak sedikit. Kasus meliputi genosida, kejahatan perang, serta kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan merupakan tindakan mengacu pada pembunuhan massal serta penyiksaan tubuh orang-orang terhadap suatu kejahatan penyerangan kepada orang lain. Perdamaian, Seperti yang digunakan oleh OHCHR, pemeliharaan perdamaian mengacu pada kehadiran OHCHR di lapangan untuk membantu mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM antara pihak-pihak yang bermusuhan. Penjaga Perdamaian OHCHR secara tradisional dapat dikerahkan hanya dengan persetujuan semua pihak terkait dan dilarang memihak atau menggunakan kekuatan mematikan kecuali jika mereka diserang secara pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa upaya dan proses OHCHR dalam menyelesaikan konflik pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uyghur telah gagal.

Perlakuan Tiongkok terhadap Uighur setelah upaya dan proses yang dilakukan oleh OHCHR yang gagal masih terus berlanjut dan sekitar 50 negara mengirim laporan yang sama seperti Uighur pada tahun 2017 kepada PBB untuk di kirim kepada OHCHR dalam menanggapi laporan yang dikirimkan dari 50 negara tersebut. Hingga pada akhirnya laporan dari 50 negara tersebut di tolak dan langsung menutup laporan tersebut secara sepihak.

KESIMPULAN

OHCHR telah memberikan kontribusi yang sangat besar selama tahun 2017-2022 dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Uighur Xinjiang. Namun, dibalik kontribusi-kontribusi yang telah diberikan pada PBB nyatanya masih ada hambatan dalam menyelesaikan konflik tersebut diantaranya Tiongkok dan PBB, dimana Tiongkok selalu menghalangi tim dari OHCHR selama proses penyelesaian itu berlangsung. Dan PBB sendiri yang mendapat laporan bahwa adanya upaya pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang tidak merespon dengan cepat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan OHCHR seharusnya netral ketika melakukan investigasi tentang pelanggaran HAM dan HAM itu sendiri, sebab ketika OHCHR berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik maka itu dipastikan pelaksanaan investigasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik akan mudah dipengaruhi oleh salah satu pihak konflik.

Daftar pustaka

Buku

- Arianto, S. (2012). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10. (No.2), hal 75-82.
- Aprita, S. & Hasyim. Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Amelia. S. F. (2013). "Etnisitas dan politik luar negeri: respon turki terhadap penindasan etnis uyghur di xinjiang." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol.2 No.3 295-317.
- Alston. P. & Suseno-M. F. (2008). *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*. Retrieved Januari 25, 2023.

- Amalia R. (2020). KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH. Retrieved Januari 29, 2023.
- Bahar, S., & Tangdililing, A. . (1996). Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi. Ghalia Indonesia.
- Bovingdon. G. (2004, Januari 01). Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent
- Buntaran. D. (2020). Retrieved November 09, 2022. From PERAN DEWAN HAM PBB TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS NARKOBA DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE.
- Bonnenfant. I. K. (2018). Constructing the Uyghur Diaspora: Identity Politics and the Transnational Uyghur Community. Retrieved Januari 25, 2023.
- Commonwealth Youth Programme. (2007). Conflict Resolution Strategies and Skills. London, United Kingdom: Commonwealth Secretariat.
- Chen, Julie Yu Wen. 2010. "Who Made Uyghurs Visible in the International Arena?: A Hyperlink Analysis." Who Made Uyghurs Visible in the International Arena? A Hyperlink Analysis.
- Castets, Rémi, (2003). "The Uyghurs in Xinjiang – The Malaise Grows", dalam China Perspectives, No. 49, hlm. 1-21. Retrieved Januari 25, 2023.
- Deutsch, M. (2006). The Handbook of Conflict Resolution. In M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), The Handbook of Conflict Resolution (2nd Editio, p. 956). San Francisco: Jossey-Bass.
- Djumala, D. (2013). SOFT POWER UNTUK ACEH: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwyer, A. M. (2005). The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity. Language Policy, and Political Discourse, 9-10.
- Dewi, Nevy Rusmarina, Maulana Irsyad, Mufharikhin, and Ahmad Maulana Feriansyah. 2020. "Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina." Journal of Social Science Teaching, Vol.4 No.1.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., & Smith, R. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
- Fatikasari, Rizkya, and Arin Fithriana. 2019. "Kontroversi Kebijakan Re-Edukasi Terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Budiluhur Journal Of Contemporary Diplomacy Vol.3 No.2 179.

- Finnegan, Ciara. 2020. "The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction." *Journal Laws*, 9, 1.
- Finley, J. S. (2011). "No Rights Without Duties: Minzu Pingdeng in Xinjiang Since the 1997 Ghulja Disturbances." *Inner Asia* 13(1), 73-96.
- Fathurrahman. W. (2019). *KEBIJAKAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI DI XINJIANG CHINA*.
- Gurind. N. C. H. (2019). Retrieved November 09, 2022 from "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional". *Lex Et Societatis Vol. VII No. 9* 57-59.
- Hernandez, A. (2014). *National-building and Identity Conflicts: Facilitating the Mediation Process in Southern Philippines*. Leipzig-Germany: Springer VS.
- Ife, J. (2007). *Human Right and Peace*. In C. Webel & J. Galtung (Eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies* (p. 423). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Hamza, A. G. 2021. "Bolstering the Role of U.N. Treaty Bodies: A Possible Solution to the Chinese Uighur Crisis with Potentially Far-Reaching Implications." *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 506-533.
- Hanifah, Nurul, and Fahlesa Wisu Fahru Munabari. 2019. "Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina Studi Kasus: Muslim Uighur Tahun 2014-2018." *Balcony Vol.3 No.2* 145-153.
- Hidayat, Muhammad Nizar. 2013. "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina." *Jurnal Interdependence*, Vol. 1, No.3 165.
- Holder, Ross. 2020. "On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious identity of China's Uyghur minority." *The International Journal of Human Rights*.
- Howell, Anthony, and C Cindy Fan. 2011. "Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi ." *Eurasian Geography and Economics*, 52, No. 1 123.
- Hess, Steve. 2009. "Dividing and conquering the shop floor: Uyghur labour export and labour segmentation in China's industrial east." *Central Asian Survey* 28(4), 403-416.
- Handayani. E. R. (2021). *Dalam Bayang Separatisme: Sikap Ambivalen Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur di Tiongkok*. Retrieved Januari 24, 2023.

- Hanafi, I. (2015). Retrieved November 09, 2022. From RESOLUSI NO. 888 DEWAN KEAMANAN IMPLEMENTASI HAM OLEH PBB.
- Ismira, Andi. (2019). Retrieved November 09, 2022. From "Xinjiang Human Right Violation and Radicalism Issue : A Development Inequality Framing ." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol.2 No.1 22-44.
- Jefimovs, N. (2018). Evaluation of Security Measures: the Peculiarities of the Application of Mediation in the Area of Resolving Criminal Legal Conflicts. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 6(1), 85–102.
- Jamali, Muhammad Zacky. (2020). Retrieved November 09, 2022. From "Amnesty International dan Organisasi Kerjasama Islam ." *Jurnal PIR* Vol.5 No. 1.
- Kazanský, R., & Andrassy, V. (2019). Conflict Resolution Approaches Towards Smart Sustainability of Internal Relations. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(3), 1468–1484.
- Karns, Margaret P, Karen A Mings, and Kendall W Stiles. (2015). Retrieved November 09, 2022. From *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Boulder and London: Lynne Rienner Publisher.
- Karisma, Gita. (2017). Retrieved November 09, 2022. From "Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah." *Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 1 41-52.
- Lestari, P, Prabowo, A, Ishak, A, Junaedi, F, Budi, S, Widodo, Y. (2012). Retrieved Januari 25, 2023. *Komunikasi Militer*.
- Lewis, B. (1990). The roots of Muslim rage: why so many Muslims deeply resent the West, and why their bitterness will not easily be mollified. *The Atlantic*, (3). 47.
- Manzilati, Asfi. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mackerras, C. (1972). *Thei Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories*. Canberra: Australian National University Press.
- Meancilla, Fransisca. (2020). Retrieved November 09, 2022. From "Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok." *Journal of International Relation* Vol.6 No.2 368-374.

- Melati, M. R. (2020). *ANALISIS STRIKE HARD CAMPAIGN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM UIGHUR DI PROVINSI XINJIANG PASCA PERISTIWA 9/11*.
- Manggabarani, A. Yogi. (2014). Retrieved November 09, 2022. From "Upaya Pemerintah Cina Menyelesaikan Konflik Dan Pemberontakan Di Xinjiang 1990-Sekarang."
- MOI (Ministry of Information). 2009. 50 ge 'weishenme': weihu guojia tongyi, fandui minzu fenlie, jiaqiang minzu tuanjie duben (The 50 Whys: Protecting National Unification, Opposing Ethnic Separatism, Strengthening Ethnic Unity Study Book). Urumqi: Xinjiang Education Press.
- Mullaney, Thomas S. 2011. *Coming To Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Murthi, K. N. (2022). Retrieved 2023, Januari 25. Implementasi resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Nomor 2462 dalam menanggulangi nasional penanggulangan terorisme (BNPT).
- Nurhasim, M. (2008). Retrieved November 09, 2022 *Konflik dan Integritas Politik Gerakan Aceh Merdeka: kajian tentang Konsesnsus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian PolitikLIPI.
- Nursamsi, Dedy. (2015). Retrieved November 09, 2022 "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol.2 No.2.
- Oktaviani, S. (2019). Retrieved Januari 24, 2023. From *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Tahun 2017*.
- Ohchr.org. (juli, 2008). *Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism*. Retrieved November 09, 2022.
- Pundilaras, B. (2022). Retrieved November 09, 2022, from *Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022*.
- Purba, R. C. (2020). Retrieved November 09, 2022. From "Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang ditengah Tekanan Internasional." *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 4 578-588.

- Pane. Y. O. (2021). RESPON DUNIA INTERNASIONAL PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR (2014-2018). Retrieved Januari 24, 2023.
- Rahmawati. F. M. (2010). Retrieved Januari 17, 2023. From Peacekeeping operation PBB pada konflik Darfur tahun 2004-2008.
- [Rahmayuni. D. \(2019\). Retrieved November 09, 2022. From hierarki Pengaruh Isu-Isu Keragaman Agama dan Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao 国际日报 \(Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang\).](#)
- Rakhima, A. S. & Ni Gusti A. D. S. (2019). Retrieved November 09, 2022. From "Gross Violations of Human Rights Veiled within Xinjiang Political Reeducation Camps." Kertha Patrika Vol.41 No.1 1-16.
- Ramithmanda. A. D. (2021). ANALISIS DAMPAK ISU ETNIS UIGHUR TERHADAP SENTIMEN ANTI TIONGKOK DARI KAANGAN MUHAMMADIYAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2019. Retrieved Januari 24, 2023.
- S.G. Goldberg; E.A. Frank; N.H. Rogers; Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, (2nd ed.) (Boston: Little, Brown and Company, 1992) at 3.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Saragih, Muhammad Fajrin. (2016). Retrieved November 09, 2022. From "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." Sumatra Journal of International Law Vol.4 No.2.
- Simanullang. D. J. (2018). Retrieved November 09, 2022. From PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP IMIGRAN YANG MENJADI BUDAK DI LIBYA.
- Sudarsono. A., Dewi. A. P., Kirana. A. A. P. (2019, Februari). Di Bawah Langit Xinjiang. Retrieved Januari 19, 2023.
- Sefriani. (2007). "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998." JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 314-332. Retrieved Januari 19, 2023.
- Schein. L. (2000). Minority Rules: The Miao and the Feminine in China's Cultural Politics. Durham, NC: Duke University.

- Setiyono. J. (2020). Peradilan internasional atas kejahatan berat. Retrieved Januari 25, 2023.
- Shan, Wei dan Gang Chen, 2009. "The Urumqi Riots and Ethnic Policy in Xinjiang", dalam East Asian Policy, Vol. 1 No. 3, hlm: 14-22.
- Subagya. F. (2018). PRAKTIK REPRESIF DAN DISKRIMINATIF PEMERINTAH PROVINSI XINJIANG TERHADAP KELOMPOK MINORITAS UIGHUR. Retrieved Januari 25, 2023.
- Setyasiswanto . S. (2009). Panduan Untuk Pekerja HAM : Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia. Retrieved Januari 25, 2023.
- securitycouncilreport.org. (2019). The UN Security Council Handbook. Retrieved Januari 29, 2023.
- The Law Society of Upper Canada "Short Glossary of Dispute Resolution Terms" (Toronto: 1992) at 6.
- Tampubolon. H. (2016). STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN BERSAING. Retrieved November 09, 2022.
- Tenor. A. B. (2011). Retrieved Januari 25, 2023. PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ISRAEL – PALESTINA.
- Tippe. S. & Subagyo. A. (2016). Retrieved Januari 25, 2023. KAPITA SELEKTA HUBUNGAN INTERNASIONAL.
- Tschirgi. N. (2003). Retrieved November 09, 2022. From Peacebuilding as the Link between Security and Development: Is the Window of Opportunity Closing?.
- Veeger, K. . (1990). Realitas Sosial: Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Retrieved November 09, 2022.
- Wallenstein, P. (2002). Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. London, United Kingdom: SAGE Publications.
- Wahyuni. A. (2019). PERAN WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM PENANGANAN KONFLIK ETNIS UYGHUR DENGAN PEMERINTAH CHINA PERIODE 2014-2018. Retrieved November 09, 2022.
- Wardhani, Baiq L.S.W. (2011). "Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang." Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 24, No. 4, 2.

- Yusuf, H. (2021). Retrieved Januari 17, 2023, from Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021.
- Yuwono. D. A. (2020). PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) OLEH PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI XINJIANG CHINA: STUDI KASUS ETNIS UIGHUR (2015-2019). Retrieved November 09, 2022.
- Zahra. I. (2019). Retrieved November 09, 2022. From "Security Council and General Assembly Reformation: Responding Human Rights Issues." *Padjajaran Law Review* Vol.7 No.1.
- Zulkarnain, and Syifa N. G. (2020). Retrieved November 09, 2022. From "Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighru di Xinjiang (2009- 2015)." *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.5 No.10.
- Zulkarnain. I. N. (2019). Retrieved Januari 26, 2023. From UPAYA ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA DI XINJIANG CHINA

Jurnal

- Azizah, A. (2014, Januari 04). Retrieved November 09, 2022, From Konflik antara China dengan Xinjiang.
- Anam. S. (2018). Kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)* Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Retrieved Januari 25, 2023.
- Boutros-Ghali, B. (1992). *An Agenda for Peace*. New York.
- Ban Ki-moon (2015, October 01). *History of the UN*. Retrieved November 09, 2022.
- Dabphet, S. (2020). Retrieved Januari 25, 2023 *Research Paper: Conflict Management in China: A Case of Muslim Uyghurs in Xinjiang*. Bangkok: Thailand Research Fund (TRF).
- Dabphet, Siriporn. 2016. "China's Economic Development: Income Inequality and Ethnicity." In *Proceedings of the 2016 ICBTS Conference*, Boston, June 28 – July 4.
- Hadi. I G. A. A. (2016, Februari). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INDIVIDUAL OLEH DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB SUATU TINJAUAN TERHADAP TAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI.
- Herli. A, Arsyta. I. M, Rahma. A. S, Zilvania. S. P (2022, Juni 01). ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BAGI WARGA UIGHUR ATAS KEJAHATAN GENOSIDA YANG DILAKUKAN OLEH CHINA MENURUT STATUTA ROMA. Retrieved Januari 04, 2023.

- Irham. A. (2020, Desember 30). Retrieved November 09, 2022. From Penegeakan Yuridiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute.
- I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). *YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*.
- Karisma, G. (2017). Retrieved 25 Januari, 2023. Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *Jurnal Sosiologi Universitas Lampung*, 41-52.
- Lai. H. (2009 July/September). Retrieved Januari 25, 2023. From CHINA'S ETHNIC POLICIES: POLITICAL DIMENSION AND CHALLENGES
- Lim. J.P. (2021). Applying International Law Solutions to the Xinjiang Crisis. Retrieved November 09, 2022.
- Mansi. E. (2020). Retrieved Januari 26, 2023. From Poverty—A Challenge for Economic Development? Evidences from Western Balkan Countries and the European Union
- Putri. F. A. & Yumitro. G. (2022). Retrieved Januari 26, 2023. From Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang
- Supriyanto. B. H. (2014, Maret). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 2, No 3, Maret 2014
- Silfiana. D. (2018, Juni 03). Retrieved Januari 25, 2023. PEMBANGUNAN EKONOMI CINA BERDASARKAN TEORI DENG XIAOPING DAN KONSEP TIGA PERWAKILAN.
- United Nation. n.d. United Nation. As World War II was about to end in 1945, nations were in ruins, and the world wanted peace. Representatives of 50 countries gathered at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco, California from 25 April to 26 June 1945.
- Woodhouse, T. (2010). Adam Curle: Radical Peacemaker and Pioneer of Peace Studies. *Journal of Conflictology*, 1(1), 5.
- Wardhani, B. L. (2011). Respon China atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 292-301.

Wardhani, B. L. (2011). Respon China atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 300.

Wibawa. A. & Arisanto. P. T. (Agustus 06, 2019). Retrieved Januari 25, 2023. From Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao.

Website / Internet

Amindoni, A. (2019, Desember 19). *BBC Indonesia*. Retrieved November 09, 2022, from Muslim Uighur: Mengapa ormas Islam dan pemerintah Indonesia ‘bungkam’ atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang?: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50835364>

Abdureshid, N. (2022, November 18). Retrieved November 09, 2022, from china uses carrots and sticks to boost Uyghur-Han intermarriage: report <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/marriage-assimilation-11182022195239.html>

CNNIndonesia.com. (2018, Desember 18). Retrieved November 09, 2022, from Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190318162339-113-378407/china-akui-tahan-hampir-13-ribu-orang-di-xinjiang>

CNNIndonesia.com. (2022, Juli 19). Retrieved November 09, 2022, from Bagaimana Sejarah Xinjiang Bisa Jadi Kampung Muslim Uighur di China?: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719073003-113-823168/bagaimana-sejarah-xinjiang-bisa-jadi-kampung-muslim-uyghur-di-china>

CNNIndonesia.com. (2019, September 26). Retrieved November 09, 2022, from Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uyghur>

CNN Indonesia (2019, September 26). Retrieved November 09, 2022 from Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur Baca artikel CNN Indonesia "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134434140/puluhan-anggota-pbb->.

CNNIndonesia.com. (2022, September 01). Retrieved November 09, 2022, from Cerita Tahanan Xinjiang Disiksa hingga Diperkosa Aparat China:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220901111559-113-841839/cerita-tahanan-xinjiang-disiksa-hingga-diperkosa-aparat-china>

CNNIndonesia.com. (2022, September 01). Retrieved November 09, 2022, from 8 'Dosa' China ke Muslim Uighur di Xinjiang Versi PBB:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220901123051-113-841870/8-dosa-china-ke-muslim-uighur-di-xinjiang-versi-pbb>

CNNIndonesia.com. (2022, Oktober 08). Retrieved November 09, 2022, from Alasan RI Tolak Debat Isu Muslim Uighur di PBB:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221008144226-106-858034/alasan-ri-tolak-debat-isu-muslim-uighur-di-pbb>

CNNIndonesia.com. (2022, Agustus 08). Retrieved November 09, 2022, from 11 Negara dengan Perbatasan Antarnegara Terbanyak, China sampai Turki:
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220808135656-574-831727/11-negara-dengan-perbatasan-antarnegara-terbanyak-china-sampai-turki#:~:text=Perbatasan%20negara%20China%20di%20bagian,Vietnam%2C%20Laos%2C%20dan%20Myanmar.>

CNNIndonesia.com. (2018, Desember 07). Retrieved November 09, 2022, from PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181206203220-113-351721/pbb-desak-china-buka-akses-ke-kamp-konsentrasi-uighur>.

CNN Indonesia. (2018, Desember 07). Retrieved 2022November 09 PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur Baca artikel CNN Indonesia "PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181206203220-113-351721/pbb-desak-china-buka-akses>.

CNN Indonesia. (2019, Januari 08). Retrieved November 09, 2022. From *China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur Dengan Syarat*:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190108023507-113-359167/china-izinkan-pengamat-pbb-ke-kamp-uighur-dengan-syarat>

- Congress.gov. (2021, Februari 18). Retrieved November 09, 2022. From H.R.1155 Uyghur Forced Labor Prevention Act: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1155/text>
- Conrad, Naomi. (2020, Februari 18). Retrieved November 09, 2022 China Tangkap Banyak Muslim Uighur Tanpa Alasan: <https://www.dw.com/id/cinatangkap-banyak-muslim-ughur-tanpa-alasan/a-52414594>.
- Dw.com. (2022, Mei 25). Retrieved November 09, 2022, from Komisaris HAM PBB Awali Kunjungan di Xinjiang: <https://www.dw.com/id/komisaris-ham-pbb-awali-kunjungan-di-xinjiang/a-61916590>
- Dw.com. (2021, September 12). Retrieved November 09, 2022. From AS Sahkan UU Larangan Impor Produk dari Xinjiang China: <https://www.dw.com/id/as-sahkan-uu-larangan-impor-produk-dari-xinjiang-cina/a-60064121>
- Fiskesjö, M. (2022). OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China. From: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf>
- Falkenheim. V. C. (1999, July 26). Retrieved Januari 17, 2023, from Xinjiang land, people, economy, government and society, cultural life, and history: <https://www.britannica.com/place/Xinjiang>
- Fmprc.gov.cn. (2022, Mei 26). Retrieved November 09, 2022. From Explanation of Vote by Ambassador Zhang Jun on the UN Security Council Draft Resolution on the DPRK: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202205/t20220527_10693344.html
- Gunter. J. (2021, Desember 09). Retrieved November 09, 2022, China melakukan genosida atas etnik Uighur lewat sterilisasi paksa, ungkap pengadilan independent di Inggris: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59598129>
- Government of Canada. (1989). Retrieved November 09, 2022, from Mediation: <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/04.html>
- Government of Canada. (2021, Juni). Retrieved November 09, 2022 from Joint statement on human rights situation in Xinjiang at 47th Session of UN Human Rights Council: https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relations_relations_internationales/unonu/statements-declarations/2021-06-22-statementdeclaration.aspx?lang=eng.

- Garside, J., & Harrison, E. G. (2019, November 25). *The Guardian*. Retrieved Januari 17, 2023, from UK calls for UN access to Chinese detention cams in Xinjiang: <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/ukcalls-for-un-access-chinese-detention-camps-xinjiang>
- gb.china-embassy.gov.cn. (2021, September 10). Retrieved November 09, 2022. From Ambassador Zheng Zeguang Makes Remarks and Answers Questions at Online Press Conference on Xinjiang-related Issues Co-hosted by Chinese Ministry of Foreign Affairs and Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region: http://gb.china-embassy.gov.cn/eng/ambassador/dsjhjcf/202109/t20210910_10253559.htm
- Hughes, R. (2018, Desember 18, di perbarui 19 Desember 2018). Retrieved November 09, 2022, Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka, yang perlu Anda ketahui. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>
- Hasugian, M. R. (2020, September 19). Retrieved November 09, 2022, Buku Putih Ini Ungkap Peran Cina di Misi Pasukan Perdamaian PBB Selama 30 Tahun: <https://dunia.tempo.co/read/1387946/buku-putih-ini-ungkap-peran-cina-di-misi-pasukan-perdamaian-pbb-selama-30-tahun>
- Hoshur, S. (2022, November 23). Retrieved November 09, 2022, from China appears to ease up on Islamic worship xinjiang, but Uyghurs aren't buying it: <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/reopened-mosques-11232022170624.html>
- Hunter et Al. 1993. *Pengetian Fasilitas*, diperoleh pada 12 Januari 2022 di http://puskilathut.org/baktirimbawan/fasilitas/pengertian_fasilitas.html
- Hernandez. M. (2022, Juni 09). Retrieved November 09, 2022, from China dan Rusia pertahankan keputusan veto sanksi baru PBB terhadap Korea Utara: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-dan-rusia-pertahankan-keputusan-veto-sanksi-baru-pbb-terhadap-korea-utara/2609216>
- Human Rights Watch. (2017, September 05). Retrieved November 09, 2022, from *The Costs of International Advocacy China's Interference in United Nations Human Rights Mechanisms*: <https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costsinternational-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights>.
- HRW. (2017, September 05). Retrieved November 09, 2022, From *The Costs of International Advocacy China's Interference in United Nations Human Rights Mechanisms*:

<https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-internationaladvocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights>.

Hrw.org. (2013, November 06). Retrived November 09, 2022. From SISI BURUK PERTUMBUHAN HIJAU: Dampak Tatakelola Pemerintahan yang Lemah dalm Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia:
<https://www.hrw.org/id/report/2013/11/06/256454>

Human Right Watch . (2019, Juli 10). Retrieved November 09, 2022. UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses. Retrieved November 09, 2022.
<https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-chinaend-xinjiang-abuses>.

Hrw.org (2021, April 19). Retrieved November 09, 2022. “Break Their Lineage, Break Their Roots”, China’s Crime against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims: https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting#_ftn8

hrw.org. (2021, April 17). Retrieved November 09, 2022. From China: Crimes Against Humanity in Xinjiang: <https://www.hrw.org/id/news/2021/04/17/378440>

Human Right Watch . (2019, Juni 12). Retrieved November 09, 2022. From UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses:
<https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-chinaend-xinjiang-abuses>.

Hrw.org. (2020, Januari 31). Retrieved November 09, 2022. From Indonesia Bungkam Soal Xinjiang: <https://www.hrw.org/id/news/2020/01/31/338369>

Hughes. R. (2018, Desember 19). Retrieved Januari 25, 2023. From Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka, yang perlu anda ketahui:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>

Hrw.org. (2022, Mei 20). Retrieved November 09, 2022. From UN: Rights Chief’s Creadibility at Stake in China Visit: <https://www.hrw.org/news/2022/05/20/un-rights-chiefs-credibility-stake-china-visit>

Hrw.org. (2022, Agustus 31). Retrieved November 09, 2022. From China: New UN Report Alleges Crimes Against Humanity: <https://www.hrw.org/news/2022/08/31/china-new-un-report-alleges-crimes-against-humanity>

Isabela, M.A.C. (2022, Maret 17). Retrieved November 09, 2022, from Kejahatan Kemanusiaan dan Contohnya: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/02000021/kejahatan-kemanusiaan-dan-contohnya>

Ishr.ch. (2022, October 06). Retrieved 09, 2022. From Despite State's failure, Uyghurs and rights groups won't give up efforts to hold China accountable at the UN: <https://ishr.ch/latest-updates/despite-states-failure-uyghurs-and-rights-groups-wont-give-up-efforts-to-hold-china-accountable-at-the-un/>

Ishr.ch. (2022, September 01). Retrieved Januari 29, 2023. From THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: ANAYSIS AGAINTS THE 'OBJECTIVE CRITERIA': https://ishr.ch/wp-content/uploads/2022/08/China-Objective-Criteria-Assessment_August-2022-1.pdf

Jatim.antaranews.com. (2011, Juli 19). Retrieved November 09, 2022, from Bentrokan di Xinjiang China Tewaskan 20 Pemrotes Uighur: <https://jatim.antaranews.com/berita/67107/bentrokan-di-xinjiang-china-tewaskan-20-pemrotes-uighur>

Janice M. Fleischer and Zena D. Zumeta, (1999, Desember 23). Retrieved Januari 16, 2023, from *preventing Conflict through Facilitation: A Comparison of Mediation and Facilitatio, The Collaborative Workplace*: <https://mediate.com/preventing-conflict-through-facilitation/>

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (2019, April 06). Retrieved November 09, 2022. From MEKANISME HAM PBB https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman_list_lainnya/mekanisme-ham-pbb

Kusá, D. (2018). Retrieved Januari 16, 2023. From Riešenie Konfliktov: od tradičných ku konfliktom identity Http://Www. Academia. Edu/2556851/Riešenie_konfliktov_I_a_II https://www.academia.edu/2556851/Rie%C5%A1enie_konfliktov_od_tradi%C4%8Dn%C3%BDch_ku_konfliktom_identity

- Kinzelbach. K. (2016, April 05). Retrieved November 09, 2022. From Executive Summary:
<https://www.gppi.net/2016/04/05/chinas-white-paper-on-human-rights>
- Kemenkumham. (2022, Oktober 09). Retrieved November 09, 2022. From Yasonna Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan HAM PBB:
<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5728-yasonna-serahkan-laporan-ham-nasional-ke-dewan-ham-pbb>
- Kompas.com. (2021, Desember 09). Retrieved November 09, 2022. From Peran PBB dalam Menciptakan Perdamaian Dunia:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/173000469/peran-indonesia-dalam-menciptakan-perdamaian-dunia?page=all>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2021). Retrieved November 09, 2022. From Laporan Hak Asasi Manusia 2021: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2021/>
- Komnasham.go.id. (2018, Februari 08). Retrieved November 09, 2022. From Catatan Komisioner Tinggi HAM PBB di Akhir Kunjungan di Indonesia:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/8/480/catatan-komisioner-tinggi-ham-pbb-di-akhir-kunjungan-di-indonesia.html>
- Lestari. D & Longdong. N. (2022, April 27). Retrieved November 09, 2022. From Tim PBB Datangi China Terkait Dugaan Pelanggaran HAM atas Kaum Uighur:
<https://www.viva.co.id/berita/dunia/1470749-tim-pbb-datangi-china-terkait-dugaan-pelanggaran-ham-atas-kaum-uighur>
- Lippman. D. & Toosi. N. (2020, Juli 25). Retrieved November 09, 2022. From Trump administration weighs accusing China of ‘genocide’ over Uighurs:
<https://www.politico.com/news/2020/08/25/trump-administration-china-genocide-uighurs-401581>
- Maizland. L. (2022, September 22). Retrieved Januari 24, 2023. From China’s Repression of Uyghurs in Xinjiang: <https://www.cfr.org/background/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights>
- Mooney. P. & Lague. D. (2015, Desember30). Retrieved Januari 29, 2023. From China controls dissidents abroad through relatives back home:
<https://www.reuters.com/article/us-china-uighurs-idUSKBN0UD1BE20151230>
- Newint.org. (2018, September 14). Retrieved Januari 17, 2023, from IS CHINA DETAINING A MILLION UYGHUR MUSLIMS?:
<https://newint.org/features/2018/09/14/china-detaining-million-uyghur-muslims>

- News.un.org. (2022, September 07). Retrieved Januari 17, 2023, from Rights experts urge China to address grave violations in Xinjiang province: <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126151>
- Noer. C. H. (2011, Juli 19). Retrieved Januari 19, 2023, from Bentrokan di Xinjiang China Tewaskan 20 Pemrotes Uighur: <https://jatim.antaranews.com/berita/67107/bentrokan-di-xinjiang-china-tewaskan-20-pemrotes-uighur>
- Nebehay. S. (2021, Desember 11). Retrieved Januari 18, 2023. From U.N. says to publish findings soon on abuses in Xinjiang: <https://www.reuters.com/world/china/un-publish-xinjiang-findings-soon-2021-12-10/>
- Nursalikah. A. (2020, 24 Oktober). Retrieved Januari 25, 2023. From China Terpilih Sebagai Anggota Dewan HAM PBB: <https://iqra.republika.co.id/berita/qi76yg366/china-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb>
- News.detik.com. (2021, October 22). Retrieved November 09, 2022. From 43 Negara Minta China Hormati Hak-hak Uighur di Xinjiang: <https://news.detik.com/internasional/d-5777536/43-negara-minta-china-hormati-hak-hak-uighur-di-xinjiang>
- Ohchr.org. (2022, November 24). Retrieved November 09, 2022, from China: UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination calls for probe into Xinjiang rights violations: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang>
- Ohchr.org. (2022, Agustus 12). Retrieved November 09, 2022, from A/HCR/51/31: Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5131-report-working-group-enforced-or-involuntary-disappearances>
- Ohchr.org. (2022, Agustus 31). Retrieved Januari 17, 2023, from OHCHR Assessment of human right concern in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China: <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-assessment-human-rights-concerns-xinjiang-uyghur-autonomous-region>
- OHCHR, (2022). Retrieved November 09, 2022, from *Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet after official visit to China*: <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/statement-un-highcommissioner-human-rights-michelle-bachelet-after-official>.
- Ohchr.org. (2021, Juni 14). Retrieved November 09, 2022. From China: UN human Rights experts alarmed by 'organ harvesting' allegations: <https://www.ohchr.org/en/press->

[releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations)

Ohchr.org. (2013, Maret 21). Retrieved November 09, 2022. From Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea:

<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-idprk/commission-inquiryon-h-rin-dprk>

OHCHR. (2022, Juni 10). Retrieved October 06, 2022 China must address grave human rights concerns and enable credible international investigation: UN experts:

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/china-mustaddress-grave-human-rights-concerns-and-enable-credible>.

OHCHR. (2022, May 28). Retrieved November 09, 2022. From Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet after official visit to China.

<https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/statement-un-highcommissioner-human-rights-michelle-bachelet-after-official>.

OHCHR. n.d. United Nations Human Rights Treaty Bodies. Retrieved November 09, 2022.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=36&Lang=EN.

Ohchr.org. (2016, September 13). Retrieved November 09, 2022. From Opening Statement by Zeid Ra'ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights, at the 33rd session of the Human Rights Council:

<https://www.ohchr.org/en/statements/2016/09/opening-statement-zeid-raad-al-husseini-united-nations-high-commissioner-human>

Onu.delegfrance. (2021, October 21). Retrieved November 09, 2022. From Cross-regional joint statement on Xinjiang: <https://onu.delegfrance.org/we-call-on-china-to-allow-immediatemeaningful-and-unfettered-access-to>.

ohchr.org. (2003). Retrieved November 09, 2022. From THE INTERNASIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf>

Roseanne. G. (2022, Agustus 31). Retrieved Januari 17, 2023, from UN human rights chief issues damning report on Chinese abuses in Xinjiang:

<https://www.rfa.org/english/news/uyghur/bachelet-report-08312022172403.html>

- rfa.org. (2022, September 23). Retrieved November 09, 2022, from China, Uyghurs battle for support at UN over xinjiang rights report:
<https://www.rfa.org/english/news/uyghur/un-china-report-09232022220441.html>
- Republika.co.id. (2019, Maret 08). Retrieved November 09, 2022. From PBB Minta Akses ke Xinjiang: <https://www.republika.co.id/berita/po15w4415/pbb-minta-akses-ke-xinjiang>
- Authenticated U.S. Government Information*. (2007). Retrieved November 09, 2022, from Congressional-Executive Commission on China:
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-110HCHRG3826/PDF/chr110hhrg38026.pdf>.
- Darini, R. (2010, Oktober). *Garis Besar Sejarah China Era Mao*. Retrieved Oktober 4, 2019, from:
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/pendidikan/Garis+Bes+Sej+Cina+Era+Mao.pdf>.
- Gowan, R. (2020, September 14). Retrieved November 09, 2022. From China's pragmatic approach to UN peacekeeping: <https://www.brookings.edu/articles/chinas-pragmatic-approach-to-un-peacekeeping/>
- Peacekeeping.un.org. (2008). Retrieved November 09, 2022. From United Nations Peacekeeping Operations:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
- Rahmi, Rizal. (2022, 10 Juni). Agama Warga Negara China dan Persentasenya. Retrieved Juni 20, 2022, from <https://madiun.inews.id/read/96992/agama-warga-negara-china-dan-persentasenya>.
- Rahmi, Rizal. (2022, 10 Juni). Retrieved Juni 20, 2022. from Agama Warga Negara China dan Persentasenya: <https://madiun.inews.id/read/96992/agama-warga-negara-china-dan-persentasenya>.
- Silver, L., Devlin, K. and Huang, C. (2019, Desember 05). Retrieved November 09, 2022. From China's Economic Growth Mostly Welcomed in Emerging Markets, but Neighbors Wary of Its Influence:
<https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/>